



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 8 Agustus 2025

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 27/SE/2025

TENTANG

**PENGUNAAN KODE AKUN ANGGARAN BELANJA PADA PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Dalam rangka ketepatan penggunaan kode akun pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya terkait dengan belanja yang berpotensi menjadi aset tetap, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- A. Pelaksanaan penyusunan APBD agar menggunakan kode akun anggaran belanja yang berpedoman pada:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya; dan
 3. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022.
- B. Penggunaan kode akun belanja barang dan jasa serta belanja modal dalam penyusunan APBD agar memperhatikan:
 1. Penganggaran belanja diperlukan sebagai belanja modal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. umur pemakaian barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. perolehan barang tersebut untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak lain; dan
 - c. nilai barang atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan

minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi.

2. Penganggaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap setelah perolehan aset tetap agar menggunakan kode akun belanja modal yang akan menambah nilai aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien;
 - 2) bertambah umur ekonomis;
 - 3) bertambah volume; dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas.
 - b. nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap dimaksud memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap berdasarkan ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi.
3. Penganggaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap menggunakan kode akun belanja barang dan jasa pemeliharaan jika penganggaran belanja dimaksudkan untuk pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang bersifat rutin/terjadwal, untuk mempertahankan aset tetap yang sudah ada agar berfungsi normal atau hanya untuk memperindah suatu aset tetap, dan selain dijelaskan pada angka 1 dan angka 2.
4. Menggunakan kode akun belanja modal atas penganggaran pengadaan belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan yang dimaksudkan untuk dikapitalisasi dengan aset tetap untuk:
 - a. belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan yang dilaksanakan tahun berjalan (tahun x); dan
 - b. belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan yang dilaksanakan tahun sebelumnya (tahun x-1).
5. Dalam hal belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 menggunakan kode akun belanja barang dan jasa maka perlu dilakukan kapitalisasi pada aset tetap.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan APembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta